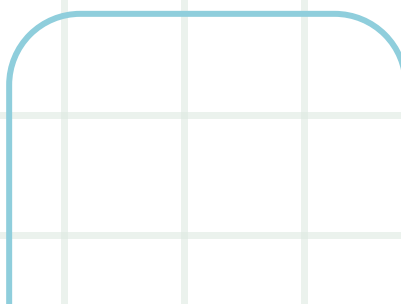
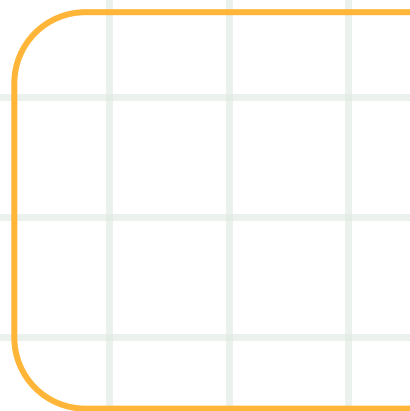


LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

UAKPA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
BAGIAN ANGGARAN 005.04



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Jakarta, 19 Februari 2025

Sekretaris,


Drs. Nasrulloh, M.SI

NIP. 196506131985031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	1
RINGKASAN LAPORAN	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	6
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
NERACA	8
LAPORAN OPERASIONAL	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
A. PENJELASAN UMUM	11
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	11
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
B.1 Pendapatan dan Hibah	20
B.2 Belanja	22
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	27
C.1 Aset Lancar	27
C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	27
C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	27
C.1.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	28
C.1.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	28
C.1.7 Piutang Perpajakan	29
C.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	30
C.1.9 Piutang Bukan Pajak	30
C.1.10 Persediaan	31
C.2 Piutang Jangka Panjang	31
C.2.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	31
C.2.2 Piutang Jangka Panjang lainnya	32
C.3 Aset Tetap	32
C.3.1 Tanah	32
C.3.2 Peralatan dan Mesin	33
C.3.3 Gedung dan Bangunan	33
C.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	34

C.4 Aset Lainnya	35
C.4.1 Aset tak berwujud	35
C.5 Kewajiban Jangka Pendek.....	35
C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga	35
C.5.2 Utang Yang Belum Ditagihkan	36
C.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka	36
C.5.4 Uang Muka dari KPPN	36
C.5.5 Utang Jangka Pendek Lainnya.....	36
C.6 Ekuitas	37
D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL.....	38
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	38
D.2 Beban Pegawai	38
D.3 Beban Persediaan.....	39
D.4 Beban Barang dan Jasa	39
D.5 Beban Pemeliharaan	40
D.6 Beban Perjalanan Dinas	40
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	42
E. 1 Ekuitas Awal	42
E.2 Surplus (Defisit) LO	42
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	42
E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	42
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset.....	42
E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi.....	42
E.4.4 Selisih Revaluasi Aset.....	43
E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	43
E.4.6 Koreksi Lain-Lain	43
E.5 Transaksi Antar Entitas	43
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	43
E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	44
E.6 Ekuitas Akhir.....	44

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Jakarta, 19 Februari 2025

Sekretaris,

Nasrulloh
Drs. Nasrulloh, M.SI

NIP. 196506131985031001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.770.000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.770.000 atau mencapai 78,67 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp2.250.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp206.083.000 atau mencapai 91,85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp224.365.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.770.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp206.083.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-204.313.000, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp204.313.000.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp204.313.000 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp204.313.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggolongan Masa manfaat Aset tak berwujud.....	18
Tabel 2. Revisi Anggaran DIPA Awal.....	20
Tabel 3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	20
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	21
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	21
Tabel 6. Perbandingan Realisasi	21
Tabel 7. Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	22
Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024	22
Tabel 9. Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	23
Tabel 10. Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	24
Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	25
Tabel 12. Rincian Belanja Bantuan Sosial.....	25
Tabel 13. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	27
Tabel 14. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	27
Tabel 15. Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023.....	28
Tabel 16. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	28
Tabel 17. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	29
Tabel 18. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited).....	29
Tabel 19. Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	30
Tabel 20. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –	30
Tabel 21. Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	31
Tabel 22. Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	31
Tabel 23. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	32
Tabel 24. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	32
Tabel 25. Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2024.....	33
Tabel 26. Mutasi tambah dan kurang peralatan dan mesin.....	33
Tabel 27. Saldo Gedung dan Bangunan.....	34
Tabel 28. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34
Tabel 29. Saldo Aset Tak Berwujud	35
Tabel 30. Rincian utang kepada pihak ketiga	35
Tabel 31. Rincian Pendapatan diterima dimuka	36
Tabel 32. Uang muka KPPN.....	36
Tabel 33. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	38
Tabel 34. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023.....	38
Tabel 35. Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	39
Tabel 36. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	40
Tabel 37. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023	41
Tabel 38. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024	43

Tabel 39. Rincian Transfer Keluar Tahun 2024	44
Tabel 40. Transfer masuk.....	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024.....23

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

URAIAN	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	2.250.000	1.770.000	78,67	1.740.000
JUMLAH PENDAPATAN		2.250.000	1.770.000	78,67	1.740.000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	224.365.000	206.083.000	91,85	160.869.000
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		224.365.000	206.083.000	91,85	160.869.000



Jakarta, 19 Februari 2025

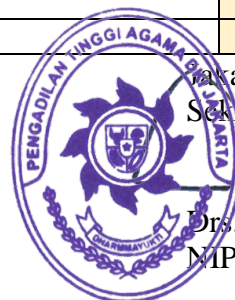
Sekretaris,

Drs. Nasrulloh, M.SI

NIP. 196506131985031001

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.1.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.1.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.1.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.2		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.2.2	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP	C.3		
Tanah	C.3.1	-	-
Peralatan dan Mesin	C.3.2	-	-
Gedung dan Bangunan	C.3.3	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.3.4	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.5.4	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.5	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-



Jakarta, 19 Februari 2025
Sekretaris,

[Signature]
Drs. Nasrulloh, M.SI
NIP. 196506131985031001

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.770.000	1.740.000
Jumlah Pendapatan		1.770.000	1.740.000
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	28.453.000	11.069.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	177.630.000	149.800.000
Jumlah Beban		206.083.000	160.869.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(204.313.000)	(159.129.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(204.313.000)	(159.129.000)
Pos Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(204.313.000)	(159.129.000)



Jakarta, 19 Februari 2025

Sekretaris,

Nawz
Drs. Nasrulloh, M.SI

NIP. 196506131985031001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(204.313.000)	(159.129.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	204.313.000	159.129.000
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		-	-
EKUITAS AKHIR	E.6	-	-



Jakarta, 19 Februari 2025
Sekretaris,

Nasrulloh
Drs. Nasrulloh, M.SI
NIP. 196506131985031001

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, terdiri dari 7 pasal. Keputusan Raja Belanda tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 153.

Setelah pendirian lembaga peradilan agama seperti diatur dalam dua Staatsblad di atas, Pemerintah Hindia Belanda mengatur kewenangan absolut peradilan agama dalam Staatsblad 1937 Nomor 116 tanggal 1 April 1937 meliputi: nikah, talak, rujuk, mahar dan tuntutan nafkah. Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura dibentuk pada tanggal 7 Maret 1938 bertepatan tanggal 5 Muharam 1357H berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610 bertempat di Gedung Cikini No. 8, Jakarta. Bersamaan dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Yogyakarta, pada tanggal 1 Januari 1946 Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta dipindahkan ke Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor T2 tanggal 2 Januari 1946.

Dalam tahun yang sama, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor IJSD tanggal 3 Januari 1946 Tentang Pembentukan Kementerian Agama RI. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama.

Pada tahun 1976, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 Tentang Pembentukan dua Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta di Wilayah Bandung dan Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung meliputi wilayah hukum Jawa Barat dan Jakarta dan untuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya meliputi wilayah hukum Jawa Timur dan Madura. Kedua cabang Mahkamah Islam Tinggi tersebut dipimpin oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta.

Nomenklatur Mahkamah Islam Tinggi diubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980. Adapun nomenklatur peradilan tingkat pertama disebut Pengadilan Agama. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1985 tanggal 16 Juli 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindahkan kembali ke

Jakarta. Keputusan itu baru dapat dilaksanakan dan diresmikan dengan nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987, bersamaan dengan dilantiknya, Drs. H. M. Taufik sebagai ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang berkantor di Jalan Cemara Nomor 42, Jakarta Pusat.

Kemudian pada akhir tahun 1999, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menempati gedung milik pemerintah daerah DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Raden Inten II, Nomor 3, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pada era ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki tugas untuk melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Agung di wilayah DKI Jakarta, yaitu membantu para pencari keadilan dalam lingkup peradilan agama, khususnya agama Islam. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki visi “TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA YANG AGUNG”. Dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan;
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
4. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa

itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan-LRA* (1) Pendapatan- LRA
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
 - Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Pendapatan-LO* 2) Pendapatan- LO
- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Belanja* (3) Belanja
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Beban* (4) Beban
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
 - Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.
- b. Aset tetap
- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- c. Penyusutan Aset Tetap
- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KM.6/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/Km.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

<i>Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap</i>	
Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 30 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Tabel 1. Penggolongan Masa manfaat Aset tak berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu

Kewajiban

harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.135.015.000. Selama tahun anggaran 2024 dilakukan revisi sebanyak 6 kali seiring dengan adanya evaluasi dan perbaikan program kerja serta adanya tambahan anggaran berupa bimbingan teknis kepaniteraaran. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Tabel 2. Revisi Anggaran DIPA Awal

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.250.000	2.250.000
Jumlah Pendapatan	2.250.000	2.250.000
Belanja		
Belanja Barang	135.015.000	224.365.000
Jumlah Belanja	135.015.000	224.365.000

*Pendapatan
dan Hibah*

B.1 Pendapatan dan Hibah

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024% adalah sebesar Rp1.770.000 atau mencapai 33,7 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.250.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.770.000. Tidak ada hibah di tahun anggaran 2024. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak disebabkan oleh meningkatnya perkara yang putus di tahun 2024 sebesar 177 perkara. Nilai PNBPN ini naik 1,72% dibanding tahun 2023 yang mana jumlah perkaranya 174 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.250.000	1.770.000	78,67
Jumlah	2.250.000	1.770.000	78,67

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.770.000	1.740.000	1,72
Jumlah	1.770.000	1.740.000	1,72

Penerimaan
Pajak

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2024 sebesar 0,00 dari TA 2023 Tidak ada penerimaan pajak pada DIPA 005.04 satker Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp1.770.000 dan Rp1.740.000. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen dari TA 2023. Perbedaan nilai PNBPN disebabkan oleh berbedanya jumlah biaya pnbp perkara putus TA 2024 dengan jumlah biaya pnbp perkara putus pada TA 2023 yang mana nilainya naik sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.770.000	1.740.000	1,72

Jumlah	1.770.000	1.740.000	1,72
---------------	------------------	------------------	-------------

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (biaya proses)	1.770.000	1.740.000	1,72
Jumlah	1.770.000	1.740.000	1,72

Keseluruhan pendapatan berasal dari biaya proses yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak 177 perkara selama tahun 2024.

Belanja

B.2 Belanja

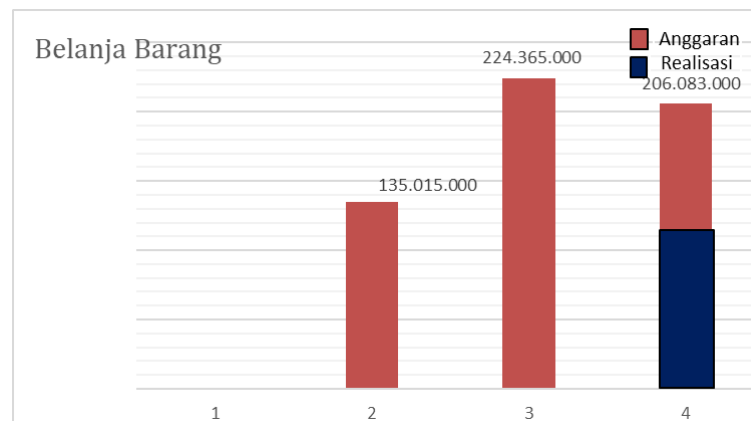
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp206.083.000 atau 152,64 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.135.015.000 dan 91,85% dari total anggaran sebesar Rp. 224.365.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	135.015.000	206.083.000	152,64
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	135.015.000	206.083.000	152,64

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 28,11% Terdapat kenaikan realisasi belanja di tahun anggaran 2024 dengan bertambahnya kegiatan dan anggaran di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang mana Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mendapat tambahan kegiatan bimbingan teknis dan dana pembinaan serta pengawasan yang lebih banyak. Realisasi meningkat seiring meningkatnya target kegiatan di tahun 2024 berupa 7 output kegiatan dibanding tahun 2023 hanya 5 output kegiatan saja. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Belanja
Pegawai

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 9. Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Jumlah belanja pegawai bernilai nol dikarenakan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode 401113 tidak memiliki belanja pegawai yang mana masuk ke dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode 401112.

*Belanja
Barang*

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp206.083.000 dan Rp160.869.000. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang digunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelesaian perkara di satuan kerja se-wilayah Jakarta.

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 28,11% dari Realisasi TA 2023. Hal inilah yang menjadikan penyerapan belanja barang di tahun anggaran 2024 jauh lebih besar dengan rincian sebagai berikut :

1. Adanya tambahan anggaran kegiatan bimtek kepanitera sejumlah Rp. 89.350.000 dengan realisasi Rp.71.480.000;
2. Adanya peningkatan jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan di tahun 2024 menjadi 7 kegiatan yang mana hanya 5 kegiatan di tahun 2023.

Tabel 10. Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	23.653.000	9.269.000	155,18
Belanja Jasa	4.800.000	1.800.000	166,67
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	177.630.000	149.800.000	18,58
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	206.083.000	160.869.000	28,11
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	206.083.000	160.869.000	28,11

*Belanja
Modal*

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 dan TA 2023 sama saja bernilai 0. Hal ini disebabkan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode 401113 tidak mendapat anggaran belanja akun 53 atau belanja Modal dalam 2 tahun terakhir.

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja
Bansos*

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2023.

Tabel 12. Rincian Belanja Bantuan Sosial

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Tidak ada belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode 401113 dalam 2 tahun terakhir sehingga nilainya nol.

B.2.5 Capaian Output

Nama Satuan Kerja	Kode	Belanja				Keluaran				Keterangan
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	1053.AEA	Peningkatan dan Pemantauan Layanan Pengadilan	174.365.000	156.193.000	89,58	7	7	Kegiatan	100	Terlaksana seluruh output
	1053.AEF	Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik	50.000.000	46.890.000	99,78	40	40	Orang	100	Terlaksana seluruh output
Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*	DIPA-005.04.2.401113/2024 (revisi ke-1 s.d 4)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	135.015.000	Revisi Halaman III, Pagu Anggaran Tetap						Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2024 (revisi ke-5)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	224.365.000	Ada Penambahan output berupa kegiatan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBPN di Pengadilan sebesar Rp. 89.350.000						Penambahan program berupa Bimbingan Teknis Kepaniteraan
	DIPA-005.04.2.401113/2024 (revisi ke-6)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	224.365.000	Revisi Halaman III, Pagu Anggaran Tetap						Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran

Penjelasan Capaian Output :

1. Seluruh Rincian Output telah terlaksana dengan capaian 100%;
2. Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai dengan jumlah yang direncanakan;
3. Keseluruhan target kinerja telah terpenuhi selama tahun anggaran 2024;
4. Terdapat 6 kali revisi anggaran dalam tahun anggaran 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2024 telah di nihilkan berdasarkan nomor SPM/SPP 00018T/401113/2024 dengan nomor SP2D 241751701005464 per tanggal 18 Desember 2024.

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 14. Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan telah nihil di akhir tahun anggaran 2024 karena seluruh perkara telah diselesaikan sejumlah 177 dan telah disetor pnbnpnya.

Kas Lainnya **C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kas Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas : selama tahun anggaran 2024 dan 2023 tidak ada kas lainnya dan setara kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran maupun penerimaan.

**Belanja
dibayar
dimuka****C.1.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) : Selama tahun anggaran 2024 dan 2023 tidak ada belanja dibayar dimuka yang mana Pengadilan Tinggi Agama Jakarta masih memiliki hak yang harus diterima di tahun 2025 sehingga nilainya nihil.

**Uang muka
belanja****C.1.5 Uang Muka Belanja (prepayment)**

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Uang Muka Belanja (prepayment)	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan Uang Muka Belanja (Prepayment) : Tidak ada uang muka yang diberikan kepada pihak lain, karena seluruh transaksi telah diselesaikan pada tahun 2024 dan 2023.

*Pendapatan
masih harus
diterima*

C.1.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Pendapatan yang masih harus diterima	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Tidak ada pendapatan yang masih harus diterima di akhir tahun anggaran 2024 karena pendapatan hanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak saja.

*Piutang
Pajak*

C.1.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan piutang pajak : selama 2 tahun terakhir tidak ada piutang pajak yang timbul selama pelaksanaan anggaran sehingga nilainya nol atau nihil.

*Piutang Tak
tertagih –
piutang pajak*

C.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	#
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Penjelasan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan : selama tahun anggaran 2023 dan 2024 tidak ada penyisihan piutang tak tertagih piutang pajak, karena selama 2 tahun terakhir tidak ada piutang pajak.

*Piutang
pajak*

C.1.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan Piutang Bukan Pajak : Selama tahun anggaran 2024 dan 2023 tidak ada piutang apapun pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode 401113 sehingga nilainya nihil atau nol.

*Persediaan***C.1.10 Persediaan**

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan Persediaan : Selama tahun anggaran 2024 dan 2023 satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada DIPA 401113 tidak terdapat anggaran dengan akun persediaan. Tidak ada kegiatan dalam DIPA yang menggunakan akun persediaan untuk dibelanjakan sehingga nilainya nol.

C.2 Piutang Jangka Panjang*Tuntutan***C.2.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi***Ganti rugi*

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas

suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Jumlah	-	-

Tidak ada piutang tagihan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi selama tahun 2024 dan 2023 dikarenakan tidak ada permasalahan selama pelaksanaan anggaran 2024 dan 2023 berlangsung.

*Piutang
Jangka
Panjang
lainnya*

C.2.2 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan Piutang : Tidak ada piutang apapun selama tahun anggaran 2024 dan 2023 sehingga nilainya nihil.

C.3 Aset Tetap

Tanah

C.3.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut tidak ada aset pada DIPA 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selama tahun anggaran 2024. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang :	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
Jumlah			-

tidak ada aset pada DIPA 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selama tahun anggaran 2024.

Peralatan dan mesin

C.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 26. Mutasi tambah dan kurang peralatan dan mesin

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Tidak ada peralatan dan mesin yang masuk maupun keluar dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode DIPA 401113.

Gedung dan Bangunan

C.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Saldo Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Tidak ada saldo Gedung dan bangunan selama tahun 2024 dan 2023 pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode 401113.

*Jalan,
Irigasi
Jaringan*

C.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Tidak ada saldo Gedung dan bangunan selama tahun 2024 dan 2023 pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode 401113.

Saldo Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan diatur pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode 401112 sehingga tidak diatur dalam DIPA dengan kode 401113.

C.4 Aset Lainnya

Aset
tak
berwujud

C.4.1 Aset tak berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Saldo Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Tidak ada bentuk aset tidak berwujud apapun pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode 401113 selama tahun anggaran 2024 dan 2023. Tidak ada akun dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 401113 yang membentuk aset, baik aset berwujud maupun tak berwujud.

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Utang
kepada
pihak
ketiga

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Rincian utang kepada pihak ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Total	-	-

Tidak ada utang kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan di tahun anggaran 2024 dan 2023. Seluruh transaksi maupun kas yang menjadi kewajiban kepada pihak ketiga telah diselesaikan.

UTYBD

C.5.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Tidak ada utang yang belum tertagih selama tahun anggaran 2024 dan 2023. Seluruh transaksi telah diselesaikan.

Pendapatan
diterima
dimuka

C.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Pendapatan diterima dimuka

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Rincian Pendapatan diterima dimuka	-	-
Total	-	-

Tidak ada pendapatan apapun yang diterima dimuka selama tahun anggaran 2024 dan 2023.

Uang Muka
KPPN

C.5.4 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Tabel 32. Uang muka KPPN

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang muka yang berasal dari KPPN sudah di nihilkan per 18 Desember 2024.

Utang
Jangka
Pendek
lainnya

C.5.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi

dalam waktu kurang dari 12 bulan. Tidak ada utang jangka pendek apapun selama tahun anggaran 2024 dan 2023.

Ekuitas

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

PNBP

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.770.000 dan Rp1.740.000. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,72. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah perkara yang putus tahun 2024 sebesar 177 perkara dan tahun 2023 sebesar 174 perkara. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.770.000	1.740.000,00	1,72
Jumlah	1.770.000,00	1.740.000,00	1,72

Beban

pegawai

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Tidak ada beban pegawai pada DIPA 005.04. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 34. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-

Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban

Persediaan

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Tidak adanya akun persediaan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode 401113 sehingga beban persediaan tidak ada pada akhir TA 2024. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	-	-	-

Beban

Barang

Jasa

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp28.453.000 dan Rp11.069.000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 157,05 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan beban barang dan jasa di tahun anggaran 2024 disebabkan adanya peningkatan kegiatan pengawasan dan tambahan anggaran berupa Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBPN di Pengadilan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka realisasi di tahun anggaran 2024 lebih besar sehingga beban yang ada juga lebih besar. Kenaikan beban juga disebabkan oleh meningkatnya target output dari 5 kegiatan di tahun 2023 menjadi 7 kegiatan di tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 36. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Bahan	23.653.000	9.269.000	155,18
Beban Jasa Profesi	4.800.000	1.800.000	166,67
Jumlah	28.453.000	11.069.000,00	157,05

*Beban***D.5 Beban Pemeliharaan***Pemeliharaan*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Tidak ada aset fisik apapun yang perlu pemeliharaan pada TA 2024.

*Beban***D.6 Beban Perjalanan Dinas***Perjadin*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp177.630.000 dan Rp149.800.000.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 18,58 persen disebabkan oleh Belanja perjalanan dinas mengalami peningkatan sebesar 18,58%.

Beban perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk melakukan bimbingan dan pengawasan kepada satuan kerja yang menurun sebesar 18,61% dan mengalami peningkatan untuk beban perjalanan paket meeting sebesar 95,51% yang mana dana ini sebagian besar merupakan biaya perjalanan dinas paket meeting untuk kegiatan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBPN di Pengadilan. Satuan kerja mendapatkan dana perjalanan dinas yang berasal dari DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023:

Tabel 37. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	82.200.000	100.990.000	(18,61)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	95.430.000	48.810.000	95,51
Jumlah	177.630.000,00	149.800.000	18,58

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*Ekuitas
Awal***E.1 Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tidak ada perubahan nilai ekuitas awal pada tahun anggaran 2023 dan 2024.

*Surplus
(Defisit)
LO***E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.204.313.000,00 dan Rp.159.129.000,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak
Kumulatif***E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi***E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada koreksi yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas akhir tahun anggaran 2024 dan 2023.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Tidak ada penyesuaian nilai aset selama tahun anggaran 2024 dan 2023.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tidak ada nilai persediaan yang dikoreksi selama tahun anggaran 2024 dan 2023.

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas

reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak ada koreksi atas reklasifikasi di tahun anggaran 2024 dan 2023.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan.

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Tidak ada koreksi nilai aset apapun karena tidak ada aset fisik

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak ada koreksi lain-lain di tahun anggaran 2024 dan 2023.

*Transaksi
antar
entitas*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.204.313.000 dan Rp.159.129.000. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Terdiri dari :

Tabel 38. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	206.083.000
Diterima dari Entitas Lain	(1.770.000)
Transfer Keluar	(92.352.000)
Transfer Masuk	92.352.000
Jumlah	204.313.000

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode

hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 206.083.000, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 1.770.000.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp-92.352.000 terdiri dari :

Tabel 39. Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Blanko akta cerai	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	7.072.000
Blanko akta cerai	Pengadilan Agama Jakarta Utara	6.240.000
Blanko akta cerai	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	16.640.000
Blanko akta cerai	Pengadilan Agama Jakarta Barat	20.800.000
Blanko akta cerai	Pengadilan Agama Jakarta Timur	41.600.000
Jumlah		92.352.000

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp92.352.000 yang terdiri dari :

Tabel 40. Transfer masuk

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Blanko akta cerai	Dirjen Badan Peradilan Agama	92.352.000
Jumlah		92.352.000

*Ekuitas
Akhir*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 401113

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
DKI JAKARTA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 19/02/2025 1:45 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 401113

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
DKI JAKARTA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 19/02/25 1:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2,250,000	1,770,000	0	1,770,000	78.67
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	2,250,000	1,770,000	0	1,770,000	78.67
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	2,250,000	1,770,000	0	1,770,000	78.67
	JUMLAH PENDAPATAN	2,250,000	1,770,000	0	1,770,000	78.67

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 1:35 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	206,083,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,770,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	92,352,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	92,352,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,770,000
3.0	521211	Beban Bahan	23,653,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,800,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,200,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	95,430,000	0
JUMLAH			300,205,000	300,205,000

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 19 Februari 2025

Peranggung Jawab UAKPA

KLIASA PENGGUNA ANGGARAN



NASRULLOH, SE

NIP. 196506131985031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 19/02/25 6:24 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 1:35 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	206,083,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,770,000	0
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,770,000
3.0	521211	Belanja Bahan	23,653,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,800,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,200,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	95,430,000	0
JUMLAH			207,853,000	207,853,000

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 19 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

K/IAS/PENGGUNA ANGGARAN

NASRULLOH, SE

196506131985031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 03/03/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 1:38 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	160,869,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,740,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	65,175,204	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	65,175,204
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,740,000
3.0	521211	Beban Bahan	9,269,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,800,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100,990,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48,810,000	0
JUMLAH			227,784,204	227,784,204

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 19 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KASIA PENGGUNA ANGGARAN



NASRULLOH, SE

NIP. 196506131985031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 1:38 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	160,869,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,740,000	0
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,740,000
3.0	521211	Belanja Bahan	9,269,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100,990,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48,810,000	0
JUMLAH			162,609,000	162,609,000

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 19 Februari 2025

Peranggung Jawab UAKPA

JASA PENGGUNA ANGGARAN

NASRULLOH, SE

196506131985031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 03/03/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 1:38 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	160,869,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,740,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	65,175,204	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	65,175,204
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,740,000
3.0	521211	Beban Bahan	9,269,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,800,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100,990,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48,810,000	0
JUMLAH			227,784,204	227,784,204

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 19 Februari 2025

Peranggung Jawab UAKPA

USA PENGGUNA ANGGARAN

NASRULLOH, SE

NIP. 196506131985031001

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2024**

Kode dan Nama UAKPA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Kode dan Nama Eselon 1 : (005.04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	V		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	V		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
2	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	V		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak

		Ya	Tidak	Seharusnya
	Rekon Internal			
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/19/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya

1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		V	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2024 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		V	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		V	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		V	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		V	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan		V	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		V	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang		V	Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar		V	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE				
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	Ya	Tidak	Seharusnya
		V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	Ya	Tidak	Seharusnya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar			Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P				
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya				
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	Ya	Tidak	Seharusnya
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		V	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		V	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	Ya	Tidak	Seharusnya
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya/Tidak
				Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	Ya	Tidak	Seharusnya
			V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)			Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)			Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
LPSAL BLU				
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	Ya	Tidak	Seharusnya
				Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak

3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
LAK BLU				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang **TIDAK SEHARUSNYA**, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKLL,



(Rizal Mutaqin, S.E., M.M.)
NIP. 197605212005021001

Jakarta, 19 Februari 2025
Penelaah,



(Andri Mardika, S.E)
NIP. 199708232020121005